

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adjie, Habib, 2011, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2013, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ash-Shofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan keempat, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Chomzah, Ali Achmad, 2002, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Daryanto, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Apolo, Surabaya.
- Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Maleong, Lexi J, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- MS, Moehar Daniel, 2003, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Cetakan ketiga, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nuh, Muhammad, 2011, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sujarweni, V. Wiratna, 2014, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, UGM, Yogyakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893)

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 21)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Kantor pertanahan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 967)

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

C. TESIS

Malute, Daniela, “Kesiapan Notaris terhadap Ketentuan Magang Bagi Calon Notaris pada Kantor Notaris di Kabupaten Sleman pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Tesis*, Prodi M.Kn Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2015.

Nurfida, Zulfida Rahmani, “Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris pada Kantor Notaris di Sleman pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Tesis*, Prodi M.Kn Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2016.

Sugani, “Pelaksanaan Magang dan Implikasinya Terhadap Kinerja Notaris Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun”, *Tesis*, Prodi M.Kn Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2015.

D. INTERNET

Arina Yulistara, “Manfaat Magang Walau Tidak Dibayar”, <https://wolipop.detik.com>.

Artikelsiana, “Pengertian Kurikulum, Fungsi, dan Komponennya”, <http://artikelsiana.com/2015/02/pengertian-kurikulum-fungsi-komponen.html>,

Dewi Padusi Daeng Muri, S.H., MKn, “PPAT menunggu Permen”, <http://medianotaris.com/ppat>.

Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Hubungan Kerja dengan PPAT bisa Horizontal maupun Vertikal”, www.inilahonline.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <http://peraturan.go.id/>.

Micom, “Inilah Syarat Baru Jadi Pejabat Pembuat Akta Tanah”,
<http://mediaindonesia.com>.

Nanda Narendra Putra, “BPN: Magang Bagi Calon PPAT Tak Harus Sesuai Domisili”, <http://hukumonline.com>.

Tri, “PPAT Dituntut untuk Profesional dan Bertanggung Jawab”,
www.atrbpn.go.id

Wikipedia, “Narasumber”, <http://id.m.wikipedia.or>.

Zul, “Pengertian Peran fungsi Jenis Peran Menurut Para Ahli”,
www.artikelsiana.com.

Moh. Mahrus, “Makalah Magang Pada Mata Kuliah Pengembangan Program Diklat TP UNDIKSHA”
<http://berandallokajaya94.blogspot.com>